

## **Peran Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh dalam Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pembangunan Perpustakaan Pasca Tsunami Aceh**

**Sri Wahyuni**

Dosen Tetap Program Studi Ilmu Perpustakaan dan Informasi Islam,  
Insitut Agama Islam Negeri Batusangkar padang  
*e-mail: sriwahyuni@iainbatusangkar.ac.id*

**Abstract:** *At the end of the year, December 26, 2004, the world was shocked by a tectonic earthquake and tsunami wave in Aceh province with 8.9 magnitude on the Richter Scale. It destroyed almost all of aspects, including psychological, social, cultural, economic, and infrastructure. The Archives and Library Agency of Aceh were also devastated by the tsunami tantrums, even though the library was not badly damaged. There is a lot of infrastructure reconstruction in Aceh, including the agency of the Archives and Library which carries out reconstruction and rehabilitation actions. It is hoped that the Aceh National Archives and Library Board will be able to get up and running as usual after the tsunami, although it takes time to realize these desires. This was clearly supported by the government through the reconstruction regulation of the Aceh Library building. This study aims to examine the extent of the role of National Archives and Library to carry out initial library revitalization to support the recovery effort. Although this study only provides an initial estimate of damage which is a natural indication. Indications are generally serious effects like an impact on the recovery of various sectors. The result from Interviews conducted by researchers was found that the development of library and maintenance infrastructure cannot be done alone, but they must build the cooperation each institutions, both by government agencies (central and regional), NGOs (local and abroad), as well as international organizations and other countries.*

**Keywords:** *Rehabilitation, Reconstruction, Tsunami*

**Abstrak:** Di akhir tahun, tepatnya 26 Desember 2004 seluruh dunia digemparkan dengan terjadi gempa tektonik yang diikuti oleh gelombang tsunami di provinsi Aceh dengan kekuatan 8,9 Skala Richter yang telah menghancurkan hampir semua aspek di provinsi Aceh termasuk psikologis, sosial, budaya, ekonomi, dan infrastruktur di masyarakat. Badan Arsip dan Perpustakaan Aceh juga diluluhlantakkan oleh amukan tsunami, meskipun perpustakaan tidak mengalami kerusakan yang parah. Ada banyak rekonstruksi infrastruktur yang ada di Aceh, termasuk intansi Badan Arsip dan Perpustakaan Aceh yang melakukan tindakan rekonstruksi dan rehabilitasi. Harapannya Badan Arsip dan Perpustakaan Aceh dapat bangkit dan berjalan seperti biasa pasca tsunami meskipun butuh waktu untuk mewujudkan keinginan-keinginan ini. Hal ini jelas didukung oleh pemerintah melalui regulasi rekonstruksi gedung Perpustakaan Aceh. Studi ini bertujuan untuk menguji sejauh mana peran Badan Arsip dan Perpustakaan Nasional untuk melakukan revitalisasi perpustakaan awal untuk mendukung upaya pemulihan. Meskipun studi ini hanya memberikan perkiraan awal kerusakan yang merupakan indikasi alami, namun indikasi umumnya efek serius yang berdampak pada pemulihan berbagai sektor lapangan. Dari hasil wawancara yang peneliti lakukan didapatkan bahwa dalam pengembangan infrastruktur perpustakaan dan perawatan ini tidak bisa dilakukan sendiri, tetapi harus membangun kerjasama dengan institusi lain, baik itu dengan lembaga

pemerintah (pusat dan daerah), LSM dalam dan Luar Negeri, serta dengan organisasi internasional dan negara lain.

**Kata Kunci:** *Rehabilitasi, Rekonstruksi, Tsunami*

## **Pendahuluan**

Indonesia merupakan negara yang memiliki potensi besar terjadi bencana. Setiap bencana pasti memberikan dampak yakni terjadi kerusakan berskala besar maupun kecil, seperti kerusakan gedung, komunikasi, dan sarana prasarana umum lainnya. bencana ini tidak dapat dihindari, sehingga dapat merugikan secara moral maupun materil bagi wilayah yang mengalaminya. Secara umum, bencana dapat dikategorikan menjadi dua jenis, yaitu bencana alam dan bencana yang disebabkan oleh manusia. Bencana alam adalah bencana yang disebabkan oleh alam, seperti gempa bumi, banjir, tsunami, atau gunung meletus. Sementara itu, bencana yang disebabkan oleh manusia antara lain perusakan bahan pustaka (vandalisme), kebocoran pada sistem pemipaan air, gangguan listrik, tertumpahnya zat beracun, dan kecelakaan dalam bekerja. (Sitepu, Vol. 3, No. 1., Tahun 2009)

Bencana gempa bumi dan gelombang tsunami yang melanda Nanggroe Aceh Darussalam atau sekarang lebih dikenal dengan Provinsi Aceh merupakan bencana alam yang luar biasa, terjadi pada hari Minggu 26 Desember 2004 setelah sebuah gempa bumi tektonik berkekuatan 8,9 skala richter di samudera Indonesia, 32 km dari pantai Melaboh, Aceh Barat. Bencana alam terbesar sepanjang sejarah manina ini menyapu sebagian besar ilayah pesisir aceh hingga Sumatera Utara, yang menelan korban jiwa hingga 150.000 lebih, 70% persen inrastruktur rusak parah, jalan-jalan, dan jembatan putus. Instansi pemerintah dan swasta hancur. Kota Banda Aceh pada waktu itu menjadi bagaikan kota mati, listrik padam, komunikasi putus, dan ratusan ribu aset pemerntah dan masyarakat bernilai kurang lebih 117 triliun menjadi puing yang berserakan (Apridar, 2005).

Badan Arsip dan Perpustakaan Provinsi Aceh juga rusak akibat bencana tsunami, walaupun gedung perpustakaan NAD tidak terlalu mengalami kerusakan yang cukup parah, akan tetapi bahan perpustakaan mereka mengalami kondisi yang cukup memprihatinkan. Berbagai koleksi tidak dapat dipergunakan kembali kecuali koleksi deposit yang terletak di lantai III, karena dapat diselamatkan oleh Kepala Bidang Layanan. Menurut Arkian (2014) menyatakan bahwa: "Dari 200 ribu eksemplar buku yang dimiliki perpustakaan NAD ini, sekitar 95 persen di antaranya telah lenyap hilang dibawa arus tsunami yang menghantam ruang bacaan utama perpustakaan tersebut".

Badan Arsip dan perpustakaan Aceh salah satu perpustakaan yang menyediakan prasarana dan sarana bagi masyarakat penggunaanya, seperti ruang ruang adminitrasi, ruang pengadaan, ruang pengolaan, ruang referensi, ruang teknologi informasi, ruang baca, ruang anak, dan ruang lainnya. Namun akibat terjadinya gempa tersebut ruangan-ruangan tersebut terkena tsunami, sehingga menyebabkan kerusakan. Oleh sebab itu, Badan Arsip dan Perpustakaan Aceh dan perpustakaan aceh juga banyak mengalami rekonstruksi dan rehabilitasi pembangunan. Mereka optimis bahwa Badan Arsip dan Perpustakaan Aceh dapat

bangkit dan berjalan seperti biasanya setelah bencana tsunami walaupun perlu waktu untuk mewujudkan keinginan tersebut. Hal ini jelas didukung oleh pemerintah melalui peraturan-peraturan rekonstruksi pembangunan Perpustakaan Aceh.

Badan Arsip dan Perpustakaan Provinsi Aceh pasca peristiwa tsunami terus berbenah setiap tahunnya dalam pembangunan infrastruktur sarana dan prasarana sebagai contoh dalam menambah koleksi buku, rak buku, meja dan kursi baca, serta pemeliharaan jaringan LAN serta mengadakan kerjasama dengan berbagai pihak baik dari Lembaga Pemerintah maupun NGO seperti Perpustakaan Nasional R.I, Perpustakaan Nasional Australia, Persatuan Pustakawan Malaysia, World Vision, Goethe Institut, UNESCO, Kota Augsburg Jerman, dan lain-lain.

## **Landasan Teori**

### **A. Perpustakaan Umum**

Menurut Sutarno (2003) Perpustakaan umum sering diibaratkan sebagai Universitas Rakyat atau Universitas Masyarakat maksudnya adalah bahwa perpustakaan umum merupakan lembaga pendidikan yang demokratis karena menyediakan sumber belajar sesuai dengan kebutuhan masyarakat, dan melayaninya tanpa membedakan suku bangsa, agama yang dianut, jenis kelamin, latar belakang dan tingkat sosial, umur dan pendidikan serta perbedaan lainnya.

Berdasarkan pendapat di atas, Perpustakaan umum merupakan perpustakaan yang diperuntukan bagi masyarakat umum secara luas baik yang tinggal di perkotaan maupun dipedesaan, dimana lokasinya dibangun ditempat yang mudah dijangkau secara umum yang bertujuan membantu mencerdaskan kehidupan masyarakat.

Masyarakat yang dilayani suatu perpustakaan umum sangat heterogen. Untuk itu, perlu diperhatikan beberapa hal tentang berikut ini:

- a. Kategori perpustakaan umum yaitu perpustakaan daerah, kotamadya, kabupaten, desa, atau perpustakaan masjid.
- b. Ukuran perpustakaan, yaitu besar, sedang, atau kecil.
- c. Lokasi perpustakaan, yaitu daerah industri, pertanian, pesisir dekat kota besar, kota besar, kota kecil, desa, atau daerah terpencil.
- d. Komposisi penduduk berdasarkan jenis kelamin, usia, pendidikan formal, pekerjaan, penghasilan dan agama. (Sulistyo-Basuki, 1991).

Saat ini perpustakaan tidak lagi hanya sebagai tempat menyimpan buku, tapi sudah mengarah kepada apa yang dibutuhkan dan diinginkan atau dikenal tindakan menjemput bola. Perpustakaan saat ini tidak lagi berdiam diri, tetapi harus mengikuti perkembangan yang terjadi di sekitarnya. Adapun peranan perpustakaan umum salah satunya yang penting adalah untuk meningkatkan minat baca masyarakat khususnya masyarakat marginal. Perpustakaan umum memiliki peran yang sangat vital dalam menjadikan masyarakat yang melek akan informasi, selain itu juga sebagai *agent of change* dalam pembangunan kebudayaan bangsa.

## **B. Pengertian Rehabilitasi dan Rekonstruksi**

Menurut Undang-Undang No. 24 (2007) dalam makalah *Pelatihan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana* pengertian **Rehabilitasi** adalah Perbaikan dan Pemulihan semua aspek layanan publik/ masyarakat sampai tingkat memadai pada wilayah pascabencana. Sasarannya adalah normalisasi/berjalannya secara wajar berbagai aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat seperti pada kondisi sebelum terjadinya bencana. Sedangkan **Rekonstruksi** Pembangunan kembali semua prasarana dan sarana serta kelembagaan pada wilayah pasca bencana pemerintahan/ masyarakat. Sedangkan sasaran utama yaitu tumbuh kembangnya kegiatan ekonomi, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban serta bangkitnya peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan.

Dari definisi di atas adapun definisi dari Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pada Badan Arsip dan Perpustakaan Aceh adalah:

- Rehabilitasi yaitu perbaikan semua aspek pelayanan di perpustakaan sampai pada tingkat yang memadai pada pascabencana dengan tujuan untuk melakukan normalisasi keadaan kembali secara wajar seperti semula.
- Rekonstruksi yaitu perbaikan kembali semua sarana dan prasarana di perpustakaan pascabencana, sasarannya untuk berkembangnya kembali kegiatan dan aktivitas, dan membangkitkan semangat masyarakat untuk berkunjung ke perpustakaan.

Namun, pada dasarnya ada yang membedakan dari kedua proses tersebut adalah bagaimana dalam hal proses tersebut dimasukkan ke dalam rencana pembangunan jangka panjang dan jangka menengah. Rehabilitasi merupakan perbaikan/pemulihan untuk kembali kepada kondisi/fungsi sebagaimana bencana sebelum terjadi. Sedangkan rekonstruksi adalah perbaikan/pemulihan dengan memperhatikan pengurangan resiko bencana, termasuk pergantian sarana dan prasarana yang dilakukan dari kegiatan tanggap darurat/peningkatan kondisi status menjadi lebih tinggi lebih baik daripada sebelum terjadi bencana (*build back better*). Kedua proses ini diperlakukan secara bersamaan atau berurutan dalam penanganan dalam dampak bencana tetapi masing-masing tidak saling mempengaruhi.

## **B. Kebijakan Rehabilitasi dan Rekonstruksi**

### **1. Program Rehabilitasi**

Menurut Enni Jasmita (2014) dalam penentuan kebijakan rehabilitasi prinsip dasar yang digunakan adalah sebagai berikut :

1. Menempatkan masyarakat tidak saja sebagai korban bencana, namun juga sebagai pelaku aktif dalam kegiatan rehabilitasi □
2. Dalam terintegrasi dengan kegiatan prabencana, tanggap darurat dan pemulihan dini serta kegiatan rekonstruksi.
3. “*Early recovery*” dilakukan oleh “Rapid Assessment Team” segera setelah terjadi bencana.
4. Program rehabilitasi dimulai segera setelah masa tanggap darurat (sesuai dengan Perpres tentang Penetapan Status dan Tingkatan Bencana) dan diakhiri setelah tujuan utama rehabilitasi tercapai.

## **2. Program Rekonstruksi Fisik**

Erni Jasmita (2014) mengemukakan Rekonstruksi fisik adalah tindakan untuk memulihkan kondisi fisik melalui pembangunan kembali secara permanen prasarana dan sarana permukiman, pemerintahan dan pelayanan masyarakat (kesehatan, pendidikan dan lain-lain), prasarana dan sarana ekonomi (jaringan perhubungan, air bersih, sanitasi dan drainase, irigasi, listrik dan telekomunikasi dan lain-lain), prasarana dan sarana sosial (ibadah, budaya dan lain-lain.) yang rusak akibat bencana, agar kembali ke kondisi semula atau bahkan lebih baik dari kondisi sebelum bencana.

Cakupan kegiatan rekonstruksi fisik mencakup, tapi tidak terbatas pada, kegiatan membangun kembali sarana dan prasarana fisik dengan lebih baik dari hal-hal berikut:

- Prasarana dan sarana
- Sarana sosial masyarakat;
- Penerapan rancang bangun dan penggunaan peralatan yang lebih baik dan tahan bencana.

## **3. Program Rekonstruksi Non Fisik**

Erni Jasmita (2014) menjelaskan mengenai rekonstruksi non fisik adalah tindakan untuk memperbaiki atau memulihkan kegiatan pelayanan publik dan kegiatan sosial, ekonomi serta kehidupan masyarakat, antara lain sektor kesehatan, pendidikan, perekonomian, pelayanan kantor pemerintahan, peribadatan dan kondisi mental/sosial masyarakat yang terganggu oleh bencana, kembali ke kondisi pelayanan dan kegiatan semula atau bahkan lebih baik dari kondisi sebelumnya.

Cakupan kegiatan rekonstruksi non-fisik di antaranya adalah:

- Kegiatan pemulihan layanan yang berhubungan dengan kehidupan sosial dan budaya masyarakat.
- Partisipasi dan peran serta lembaga/organisasi kemasyarakatan, dunia usaha, dan masyarakat.
- Kegiatan pemulihan kegiatan perekonomian masyarakat.
- Fungsi pelayanan publik dan pelayanan utama dalam masyarakat.
- Kesehatan mental masyarakat.

## **C. Pengertian Infrastruktur**

Pengertian Infrastruktur, menurut Grigg (1988) infrastruktur merupakan sistem fisik yang menyediakan transportasi, pengairan, drainase, bangunan gedung dan fasilitas publik lainnya, yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia baik kebutuhan sosial maupun kebutuhan ekonomi. Pengertian ini merujuk pada infrastruktur sebagai suatu sistem. Dimana infrastruktur dalam sebuah sistem adalah bagian-bagian berupa sarana dan prasarana (jaringan) yang tidak terpisahkan satu sama lain. Infrastruktur sendiri dalam sebuah sistem menopang sistem sosial dan sistem ekonomi sekaligus menjadi penghubung dengan sistem lingkungan. Ketersediaan infrastruktur memberikan dampak terhadap sistem sosial dan sistem ekonomi yang ada di masyarakat. Oleh

karenanya, infrastruktur perlu dipahami sebagai dasar-dasar dalam mengambil kebijakan (Kodoatie, 2005).

Pembangunan infrastruktur dalam sebuah sistem menjadi penopang kegiatan-kegiatan yang ada dalam suatu ruang. Infrastruktur merupakan wadah sekaligus katalisator dalam sebuah pembangunan. Ketersediaan infrastruktur meningkatkan akses masyarakat terhadap sumberdaya sehingga dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas yang menuju pada perkembangan ekonomi suatu kawasan atau wilayah.

Jadi, dapat disimpulkan Infrastruktur Badan Arsip dan Perpustakaan Aceh yaitu sarana dan prasana yang memadai yang menunjang untuk pelaksanaan kegiatan dan tugas pokok pada perpustakaan, sarana tersebut meliputi diantaranya gedung, jaringan, komputer, koleksi, dan fasilitas-fasilitas publik lainnya.

## **Pembahasan**

### **A. Sejarah Singkat Perpustakaan**

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh Pertama didirikan tahun 1969 dengan nama Perpustakaan Negara, yang berlokasi pada salah satu ruangan seluas 12 M dikantor perwakilan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Istimewa Aceh dengan jumlah koleksi 80 eksemplar dengan tenaga pengelola 2 (dua) orang pegawai. Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 8429/C/B.3/1979 tanggal 29 Oktober 1979 yang menyatakan bahwa Perpustakaan Negara berubah menjadi Perpustakaan Wilayah. Pada tahun 1989 terbit Kepres No. 11 tahun 1989 yang mengatur bahwa Perpustakaan Wilayah berubah nama menjadi Perpustakaan Daerah.

Terbitnya KEPRES No. 50 tahun 1997, tentang perubahan struktur organisasi Perpustakaan Nasional RI yang berdampak pula pada perubahan nama dari Perpustakaan Daerah menjadi Perpustakaan Nasional Provinsi Daerah Istimewa Aceh. Kemudian dengan terbitnya Perda Nomor 39 tahun 2001, Perpustakaan Nasional Propinsi Daerah Istimewa Aceh telah menjadi salah satu lembaga Daerah dengan nama Badan Perpustakaan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

Peristiwa gempa dan tsunami yang melanda Nanggroe Aceh Darussalam pada tanggal 26 Desember 2004 mengakibatkan aktifitas Badan Perpustakaan terhenti beberapa bulan, karena hampir seluruh koleksi buku pustaka, rak buku, meja dan kursi baca, serta jaringan LAN (Local Area Network) rusak berat, Dan pada Bulan Mei 2005 Badan Perpustakaan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam mulai melaksanakan aktivitasnya untuk memberikan layanan kepada masyarakat.

Masa pasca gempa dan tsunami banyak pihak donator baik dari dalam maupun luar negeri turut menaruh perhatian terhadap korban material, sarana prasarana yang dialami Badan Perpustakaan sehingga berbagai aliran bantuan dalam melengkapi kebutuhan Perpustakaan yang diterima antara lain dari Perpustakaan Nasional RI, PT. H.M. Sampoerna, Perpustakaan Nasional Australia, Persatuan Pustakawan Malaysia (PPM), World Vision, Goothe Institute, UNESCO, Kota Augsburg Jerman, National Library of Board (NLB) Singapore, Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (BRR) Aceh-Nias, Yayasan Guruh Soekarno dan lain-lain. Selanjutnya melalui Undang-Undang Nomor 11

Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi dan Perangkat Daerah dan Qanun Nomor 5 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Dinas, Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, maka Badan Perpustakaan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam bergabung dengan Badan Arsip Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dengan nomenklatur Badan Arsip dan Perpustakaan Aceh.

Badan Arsip dan Perpustakaan Aceh sudah beberapa kali terjadinya masa pergantian pimpinan, mulai dari tahun 2008 terbentuknya/berdirinya Badan Arsip dan perpustakaan Aceh sampai dengan tahun 2016, di awal tahun 2017 Badan Arsip dan Perpustakaan Aceh telah berganti nomenklatur baru Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh, dengan nomenklatur baru Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh Semoga makin berkembang dan sukses. (sumber: [https://arpus.acehprov.go.id/?page\\_id=114](https://arpus.acehprov.go.id/?page_id=114))



Gambar 1. Ruang Lobi Perpustakaan

### **B. Rehabilitasi dan Rekonstruksi Infrastruktur Badan Arsip dan Perpustakaan Pasca Tsunami**

Badan Arsip dan Provinsi Aceh sampai dengan saat ini telah berusia 45 tahun yang didirikan tahun 1969. Gempa dan tsunami yang melanda Provinsi mengakibatkan aktivitas Badan Perpustakaan terhenti beberapa bulan. Gedung A Lantai I rusak 50 % dan Gedung B mengalami kerusakan 70%. Sedangkan koleksi, rak buku, meja, dan kursi baca serta jaringan LAN hancur total.

Pasca gempa sepuluh tahun silam, keberadaan Badan Arsip dan Perpustakaan Aceh telah mengalami berbagai pembenahan melalui proses rehabilitasi dan rekonstruksi baik hal prasana dan prasarana. Ada tahun-tahun dimana instansi ini mengalami produktivitas tinggi dan masa-masa sulit ketika mencoba mulai bangkit pascabencana tsunami. Beberapa tahun terakhir sebelumtsunami merupakan masa dimana instansi ini sangat produktif dengan berbagai kegiatan yang diadakan sendiri maupun kerjasama dengan pihak terkait. Namun puncak dari kondisi ini semua menjadi terhenti dan semua orang tidak menduga yakni bencana Tsunami.

Pasca gempa dan tsunami upaya untuk mengaktifkan kembali layanan perpustakaan selain bantuan dari Pemda Prov. Aceh juga telah dilakukan kerjasama baik Pemerintah, Swasta dan LSM dalam dan luar negeri. Antara lain Peprustakaan Nasional RI, P.T.H.M. Sampoerna Tbk, Peprustakaan Nasional Australia, Goethe Institut Jakarta, Persatuan Pustakawan Malaysia, World Vision, Unesco Yayasan Universitas Sumatera Utara, Guruh Sukarno, Perpustakaan Nasional Singapore dan berbagai lembaga swadaya masyarakat lainnya (Arkian, 2019).

Masa-masa yang terasa memberatkan kemudian perlahan-lahan bangkit berkat usaha dan kerja keras dari personil Badan Arsip dan Provinsi serta bantuan dar berbagai NGO dan LSM masyarakat dalam pemulihan kembali infrastruktur hingga akhirnya mampu berkiprah kembali untuk melayani masyarakat pengguna kota Banda Aceh.

Seperti yang dikemukakan Arkian (2019) Selaku Kabid. Pelayanan dan Teknologi mengemukakan bahwa secara keseluruhan terjadi rehabilitasi dan rekonstruksi untuk sarana dan prasarana sebagai contoh misalnya Rak buku, koleksi, jaringan, dan peralatan-peralatan komputer, scanner. Adapun bantuan yang diberikan oleh UNESCO pada saat itu pertama kali adala komputer sebanyak 20 unit, mobil keliling, rak buku dan koleksi bacaan seperti buku yang langsung diberikan kepada perpustakaan Badan Arsip dan Provinsi Aceh.

Di tahap lain adalah pembangunan gedung ruang Agama serta rehabilitasi seluruh bagian ruangan yang terkena tsunami pada saat itu. Dan banyak terjadi perluasan dan penambahan fasilitas pasca tsunami tujuannya untuk mengaktifkan kembali layanan perpustakaan. lembaga yang banyak memberikan bantuan dalam hal rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur pada Badan Arsip dan Perpustakaan Aceh yaitu UNESCO yang merupakan organisasi dunia PBB yang bergerak di bidang pendidikan (Arkian, 2019).



Gambar 2. Ruang Deposit

Adapun tujuan Rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur Badan Arsip dan Perpustakaan Aceh yakni memulihkan kembali apa yang terkena dampak dari tsunami baik prasarana dan sarana secara fisik dan non fisik. Sedangkan dan manfaat yaitu merevitalisasikan kembali fungsi perpustakaan dan untuk meningkatkan kualitas masyarakat.



Arkian (2014) menuturkan, pasca tsunami yang berlangsung hampir sudah 10 tahun silam, perpustakaan arsip terus melakukan pembenahan dalam Badan Arsip dan Perpustakaan Aceh Rencana kedepan pasca tsunami 10 tahun Badan Arsip dan Provinsi Aceh dalam prasarana dan sarana fasilitas sistem peminjaman yang menggunakan Teknologi RFID, desain ruangan yang lebih menarik, perluasan ruangan, serta penambahan fasilitas komputer untuk akses penelusuran. Rencananya pada tahun 2015 pembangunan gedung baru akan rampung dan sudah dalam tahap perintisan. Namun karena pergantian pimpinan rencana tersebut terjadi sedikit kendala karna program kerja tersebut dilaksanakan oleh kepala yang terdahulu. Pimpinan saat ini baru dilantik bulan Oktober 2014 dan masa jabatannya masih terhitung selama 2 bulan ini. Program kerja ini akan dilanjutkan oleh pimpinan yang baru.



Gambar 3. Pembangunan gedung baru Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh

### **Kesimpulan**

Bencana gempa bumi dan gelombang tsunami yang melanda Provinsi Aceh pada tanggal 26 Desember 2004 mengakibatkan Badan Arsip dan Perpustakaan Provinsi Aceh juga rusak akibat bencana tsunami, walaupun gedung perpustakaan tidak terlalu mengalami kerusakan yang cukup parah, namun koleksi dan sarana mengalami kerusakan yang parah. Gempa dan tsunami yang melanda Provinsi mengakibatkan aktivitas Badan Perpustakaan terhenti beberapa bulan. Gedung A Lantai I rusak 50 % dan Gedung B mengalami kerusakan 70%. Sedangkan koleksi, rak buku, meja, dan kursi baca serta jaringan LAN hancur total.

Secara keseluruhan terjadi rehabilitasi dan rekonstruksi untuk sarana dan prasarana sebagai contoh misalnya Rak buku, koleksi, jaringan, dan peralatan-peralatan komputer, scanner. Di tahap lain adalah pembangunan gedung ruang Agama serta rehabilitasi seluruh bagian ruangan yang terkena tsunami pada saat itu. Dan banyak terjadi perluasan dan penambahan fasilitas pasca tsunami tujuannya untuk mengaktifkan kembali layanan perpustakaan.

Selama 15 tahun pasca tsunami, pada tahun 2019 Dinas Perpustakaan dan Arsip Aceh berencana untuk melakukan pembenahan baik dari segi prasarana dan

sarana dalam prasarana dan sarana fasilitas sistem peminjaman yang menggunakan Teknologi RFID, desain ruangan yang lebih menarik, perluasan ruangan, serta penambahan fasilitas komputer untuk akses penelusuran. Rencananya tahun 2018 pembangunan gedung baru yang masih dalam tahap pembangunan dan tahap penyelesaian.

## DAFTAR PUSTAKA

- Agung Budi Wibowo, dkk, *Sepuluh Tahun Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional Banda Aceh: Kebangkitan Pascagempa dan Tsunami*, Banda Aceh: Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional Banda Aceh, 2006.
- Apridar, *Tsunami Aceh: Adzab atau Bencana*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2005.
- Badan Arsip dan Perpustakaan Aceh, *Rencana Kerja (Renja) Badan Arsip dan Perpustakaan Provinsi NAD tahun 2010*, Banda Aceh: Badan Arsip dan Perpustakaan Provinsi NAD, 2009.
- Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana No. 17 Tahun 2010 tentang *Pedoman Penyelenggaraan Umum Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana*, 2010.
- Erni Jasmita, “Pemulihan Pasca Bencana”, dalam <http://erni-jasmita.blogspot.com/2014/01/pemulihan-pasca-bencana.html>. Akses tanggal 22 Desember 2014.
- Hasil Wawancara Bapak Arkian, S.Sos, *Selaku Kepala Bidang Pelayanan dan Teknologi Badan Arsip Perpustakaan Aceh*, tanggal 23 Desember 2014.
- P. Cahandar, *Bencana Gempa dan Tsunami Nanggroe Aceh Darussalam dan Sumatera*, Jakarta: Kompas Media Nusantara, 2005.
- Sitepu, A. (Vol. 3, No. 1., Tahun 2009). Kesiapsiagaan dalam Mengantisipasi Bencanadi Perpustakaan Pusat dan Arsip. *BACA*, 1-13.
- Sutarno NS, *Perpustakaan dan Masyarakat*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2003.
- Sulistyo-Basuki, *Pengantar Ilmu Perpustakaan*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta: 1991.
- Wisnu Widjaja, *Manajemen Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana*, Banda Aceh; BNBP, 2008.
- \_\_\_\_\_, “Sasaran Subtansi Rehabilitasi dan Rekonstruksi”, Paper dipresentasikan di acara *Pelatihan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana*, Surabaya: April 2013.